



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP) TAHUN 2024**

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**



KATA PENGANTAR

Pemerintahan dapat berjalan dengan baik apabila menjalankan sistem manajemen organisasi yang baik yaitu meliputi perencanaan , pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan. Sistem manajemen ini telah diatur sebagai suatu kesatuan dari sub-sub sistem yang saling mendukung dan mempengaruhi.

Laporan ini memuat informasi capaian kinerja atas pelaksanaan Penetapan Kinerja Tahun 2024, Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat tahun 2023-2026 dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Lampung Barat Tahun 2023-2026. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2024 ini dapat memberikan manfaat kepada seluruh jajaran organisasi dalam melakukan perbaikan yang diperlukan dalam rangka meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.

Lampung Barat, 20 Januari 2025
Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



Ir. SUGENG RAHARJO, M.T
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19650916 199402 1 002

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pelaksanaan tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Untuk penyelenggaraan pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Di Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 - 2026, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024, Pelaksanaan Perjanjian Kinerja untuk Tingkat Kepala Perangkat Daerah dan Administrator/Fungsional Madya (Pencapaian Sasaran / Program) ditahun 2024 tidak mengalami perubahan target kinerja namun pada level target sub kegiatan ada beberapa sub kegiatan yang mengalami perubahan target diantaranya sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN hal ini dikarenakan adanya pengurangan pegawai ASN yang menyebabkan perubahan pagu anggaran.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Lampung Barat, terdapat 18 pegawai ASN dan 9 pegawai THLS yang bertugas dalam pelaksanaan tupoksi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pada pelaksanaan pencapaian sasaran tahun 2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tidak lepas dari permasalahan yang cukup menghambat capaian kinerja Dinas, beberapa permasalahan yang terjadi adalah kurangnya kuantitas dan kualitas tenaga pelayanan, sarana prasarana khususnya kendaraan operasional dalam rangka pelayanan perizinan serta belum tersedianya peraturan yang mengatur tentang iklim investasi di Kabupaten Lampung Barat. Untuk mengatasi permasalahan yang terjadi, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Lampung Barat menjalankan kebijakan strategis yang diantaranya adalah optimalisasi pelayanan perizinan dan non perizinan dengan memanfaatkan teknologi dan meningkatkan iklim investasi melalui promosi dan sosialisasi terhadap pelaku usaha.

Pada tahun 2024 capaian kinerja realisasi investasi di Kabupaten Lampung Barat sebesar 187.253.670.764,- dari target Rp. 99.750.000.000,- (187,72 %) dan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan predikat A (92,69) dari target A (82) . Dalam penyelesaian kinerja di tahun 2024, terdapat faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya, diantaranya faktor pendukung Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berusaha memberikan kemudahan bagi investor untuk menanamkan investasinya di Lampung Barat dengan meningkatkan layanan Penanaman Modal secara terintegrasi serta meningkatkan kapasitas SDM dalam pemanfaatan semua aplikasi perizinan Namun ada juga faktor penghambatnya diantaranya masih adanya paradigma sebagian masyarakat yang menganggap dalam mengurus perizinan merupakan sesuatu hal yang sulit dikarenakan masyarakat belum sepenuhnya memahami cara memanfaatkan aplikasi layanan perizinan dan nonperizinan yang tersedia/secara *online*, untuk mengatasi hal tersebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terus berupaya meningkatkan sosialisasi pelayanan perizinan berusaha maupun non berusaha baik secara layanan konsultasi langsung maupun melalui media website, surat kabar,

serta pelayanan perizinan keliling ke kecamatan-kecamatan yang terintegrasi dengan pelaksanaan musrenbang kecamatan disetiap tahunnya.

Lampung Barat, 20 Januari 2025
Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



Ir. SUGENG RAHARJO, M.T.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19650916 199402 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

IKHTISAR EKSEKUTIF

DAFTAR ISIiii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang 1

B. Tugas dan Fungsi 2

C. Struktur Organisasi 3

D. Peran Strategis Perangkat Daerah 3

E. Isu Strategis 5

BAB II PERENCANAAN KINERJA 7

A. Rencana Strategis perangkat Daerah Tahun 2023 - 2026 7

B. Perjanjian Kinerja Utama dan Kerangka Pendanaan..... 11

C. Target Kinerja Tahun 2024 Menurut Renstra..... 12

BAB III KAPASITAS ORGANISASI 19

A. Analisis Sumber Daya Manusia 19

B. Analisis Sarana dan Prasarana 20

C. Analisis DPA TA. 2024 21

BAB IV AKUNTABILITAS KINERJA 22

A. Capaian Kinerja 22

B. Perbandingan Kinerja 30

C. Realisasi Anggaran 31

D. Pemanfaatan Laporan Kinerja 37

E. Survey Kepuasan Masyarakat 37

BAB V PENUTUP 40

A. Simpulan Umum 40

B. Faktor Pendukung Keberhasilan 41

C. Permasalahan 41

D. Rekomendasi Dan Tindak Lanjut 42

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. LAMPIRAN I : RENCANA AKSI KINERJA

2. LAMPIRAN II : PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

3. LAMPIRAN III : DOKUMENTASI KEGIATAN PEMBANGUNAN

4. LAMPIRAN IV : DAFTAR PENGHARGAAN

DAFTAR TABEL

BAB I

Tabel 1.1. Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja 4

BAB II

Tabel 2.1. Daftar Program dan Kegiatan 10
Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja 12
Tabel 2.3. Kerangka Pendanaan DPMPTSP 13
Tabel 2.4. Tujuan, Sasaran dan Target Kinerja 18

BAB III

Tabel 3.1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin19
Tabel 3.2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan..... 19
Tabel 3.3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan19
Tabel 3.4. Jumlah Sarana dan Prasarana 20

BAB IV

Grafik 4.1 Perbandingan capaian kinerja 23
Tabel 4.2 Rekapitulasi Realisasi Investasi 23
Tabel 4.3 Peta Relasi DPMPTSP..... 25
Tabel 4.4 Perbandingan capaian kinerja 26
Tabel 4.5 Realisasi Penerbitan Perizinan..... 27
Tabel 4.6 Peta Relasi DPMPTSP..... 29
Tabel 4.7 Perbandingan Kinerja 30
Tabel 4.8 Realisasi Penyerapan Anggaran 32
Tabel 4.9. Efisiensi Sumber Daya 36
Tabel 4.10 Realisasi IKM Tahun 2024 38



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Lampung Barat, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan tujuan dan sasaran daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas,



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

B. TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta Peraturan Bupati Lampung Barat nomor 24 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten Lampung Barat mempunyai fungsi, yaitu:

1. Perumusan Kebijakan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu;
2. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu;
3. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu;
4. Pelaksanaan Administrasi Dinas di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu;

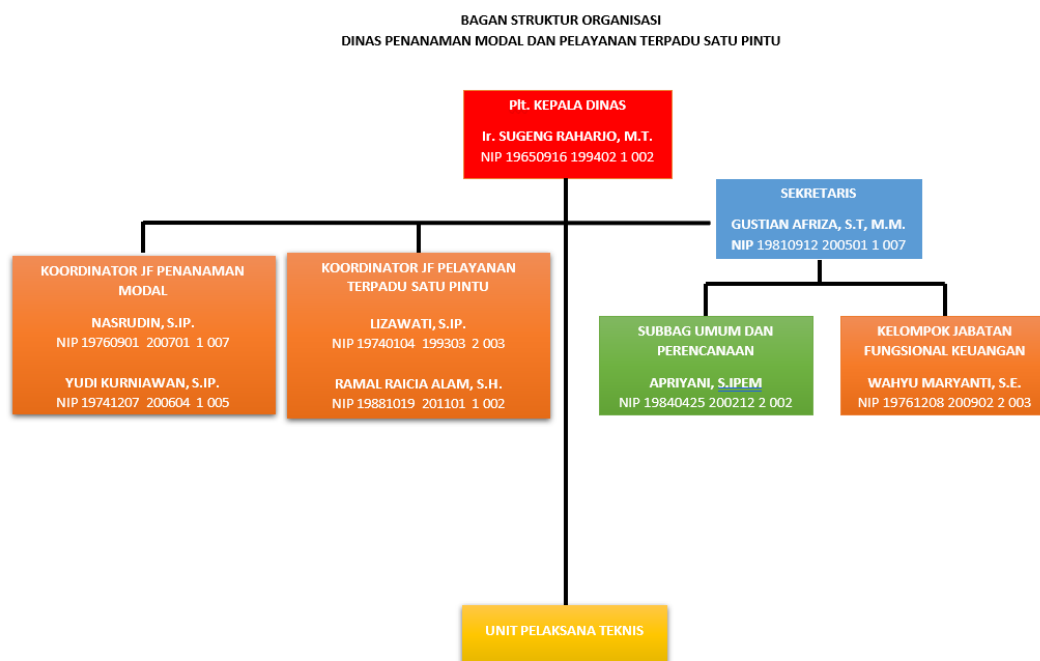


**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

5. Pelaksanaan Fungsi Lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas dipimpin oleh **Ir. Sugeng Raharjo, M.T.** yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural serta pejabat fungsional sebagai mana dalam struktur organisasi di bawah ini :



- Sumber Data Perbup No. 24 Tahun 2024 tentang Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah yang telah diolah oleh TIM Penyusun LKjIP DPMPPTSP

D. PERAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pengembangan investasi di Kabupaten Lampung Barat merupakan implementasi komitmen Kabupaten Lampung Barat sebagai wilayah konservasi, literasi dan tangguh bencana. Sebagai wilayah konservasi, pembangunan ekonomi harus memberi dukungan terhadap pelestarian lingkungan baik alam maupun budaya, hal ini tercermin dari peluang investasi yang dapat dikembangkan berupa potensi pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, pertambangan dan energi serta sektor pariwisata.



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

Adapun tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan strategis.

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 4 (Empat) tahun berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Tujuan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pertumbuhan Nilai Investasi Daerah;
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Sektor Perizinan Penanaman Modal;

Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai berikut

1. Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Daerah;
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan;

Tujuan, Sasaran dan indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Lampung Barat

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Pertumbuhan Nilai Investasi Daerah	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Daerah	Jumlah Investasi PMDN/PMA	Rupiah	Rp. 95 Milyar	Rp. 99,75 Milyar	Rp. 104,64 Milyar	Rp. 109,87 Milyar
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Sektor Perizinan Penanaman Modal;	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Predikat	79	82	85	88,5

• Sumber Data Renstra DPMPSTP Tahun 2023-2026



E. ISU STRATEGIS

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat dihadapkan pada permasalahan-permasalahan sebagaimana berikut :

Pada sisi internal, diantaranya :

1. Terbatasnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia.
2. Belum ada kendaraan operasional roda empat untuk pelaksanaan survey permohonan perizinan dan pengawasan bersama tim teknis.
3. Penerapan teknologi informasi pada pelayanan perizinan dan nonperizinan belum optimal.
4. Belum diterapkannya pemberian insentif/tunjangan khusus bagi aparatur pelaksana perizinan dan nonperizinan.
5. Belum optimalnya promosi penanaman modal dan kerja sama antar instansi dalam rangka menarik Investasi.

Sementara itu, dari sisi eksternal, antara lain :

1. Masih terbatasnya informasi kepada masyarakat di daerah-daerah tertentu yang memiliki keterbatasan akses untuk mengurus perizinan, dikarenakan tidak mengetahui cara mengurus proses perizinan secara online, dan masih ada sebagian kecil masyarakat masih menganggap dalam mengurus perizinan merupakan sesuatu yang sulit.
2. Masyarakat belum sepenuhnya memahami cara memanfaatkan aplikasi layanan perizinan dan nonperizinan yang tersedia.
3. Masih belum sepenuhnya sebagian kalangan masyarakat yang melakukan pembangunan menyadari perlunya membuat izin bagi bangunannya.
4. Belum adanya kebijakan insentif daerah bagi investor.
5. Akses dan potensi daerah yang belum terkelola dengan baik.
6. Percepatan layanan terhadap pemohon izin belum optimal khususnya kepada pemohon izin yang memerlukan kajian teknis dari tim teknis.
7. Masih perlunya kemitraan dengan dunia usaha.



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

Permasalahan ini harus diantisipasi dan ditemukan solusi permasalahannya yaitu dengan :

- a. Memastikan bahwa pelayanan perizinan dan non perizinan diselenggarakan sesuai standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan perizinan dan nonperizinan yang ada dan berlaku;
- b. Tersedianya media informasi pelayanan perizinan dan non perizinan yang applicable dan accesible sesuai dengan perkembangan teknologi;
- c. Tersedianya tenaga-tenaga pelayanan yang ramah kompeten dan profesional;
- d. Tersedianya data potensi dan eksisting perizinan dan non perizinan yang up to date, valid dan terukur.
- e. Tersedianya sarana dan prasana dalam mendukung pelayana (Kendaraan Operasional).

Berdasarkan hasil identifikasi masalah diatas maka disimpulkan isu-isu strategis pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu sebagai berikut :

1. Regulasi Perizinan yang selalu dinamis di tingkat nasional
2. Akses dan potensi daerah yang belum terkelola degan baik;
3. Perlunya Kemitraan dengan dunia usaha dalam rangka mendukung pertumbuhan UMKM



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 - 2026

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari Tujuan serta Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat.

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat yang ditetapkan untuk jangka waktu 4 (empat) tahun yaitu dari tahun 2023 - 2026 sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026.

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat tersebut ditujukan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan (RPD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 - 2026.

Penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 - 2026 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPD, Forum SKPD, sehingga Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat dan *stakeholder*.

Selanjutnya, Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Dinas Penanaman Modal dan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Strategi dan Arah Kebijakan

Arah kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat merujuk pada arah kebijakan RPD Kabupaten Lampung Barat, dimana berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengacu pada 2 (dua) Tujuan serta 2 (dua) Sasaran yaitu :

I. *Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas dengan sasaran Meningkatnya Pedapatan Perkapita* dimana Tujuan

Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yaitu Meningkatkan Pertumbuhan Nilai Investasi Daerah. Untuk mencapai tujuan serta sasaran tersebut DPMPSTP melaksanakan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut :

- a. Optimalisasi Kinerja Pelayanan Perizinan Investasi dengan arah kebijakan Penyusunan kebijakan terkait iklim pengembangan Penanaman Modal serta kebijakan yang mengatur promosi Penanaman Modal, hal ini diturunkan dalam program Pengembangan Iklim Penanaman Modal dengan indicator Jumlah Kebijakan dan atau Peraturan Perundang-undangan Pengembangan Iklim Penanaman Modal.
- b. Menjaga iklim investasi yang kondusif serta kolaborasi pendanaan pembangunan dengan arah kebijakan meningkatkan investasi melalui promosi hal ini diturunkan dalam Program Promosi Penanaman Modal, Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal (berdasarkan Renstra DPMPSTP).

II. “*Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan yang Akuntabel, Inovatif dan Transparan dengan Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik*” dengan tujuan Perangkat Daerah Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Sektor Perizinan Penanaman Modal (Indikator Indeks Pelayanan Publik) dimana Sasaran Perangkat Daerah



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan (Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat) Untuk mencapai tujuan serta sasaran tersebut DPMPPTSP melaksanakan strategi, sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kinerja dan efektivitas pelayanan publik;
- b. Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme aparatur;
- c. Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan perizinan dengan arah kebijakan kebijakan sebagai berikut :
 1. Menguatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
 2. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi pada seluruh tahapan proses penyelenggaraan pelayanan perizinan.

Hal ini diturunkan dalam Program Pelayanan Penanaman Modal (dengan indikator persentase Perizinan dan Non Perizinan yang terbit dengan Standar Layanan) serta program rutin Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Indikator Nilai SAKIP OPD).

2. Program dan Kegiatan Pembangunan

Sesuai dengan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat tahun 2023-2026, berikut uraian



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat tahun 2024 :

Tabel 2.1
Daftar Program dan Kegiatan

No	Program	Kegiatan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2.	Program Promosi Penanaman Modal	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
3.	Program Pelayanan Penanaman Modal	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
4.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
5.	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Pelayanan Modal	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

* Sumber Data DPA DPMPSTSP tahun 2024 yang telah diolah oleh TIM Penyusun LKjIP DPMPSTSP



B. Perjanjian Kinerja dan Kerangka Pendanaan

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan.

Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 - 2026, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024, Pelaksanaan Perjanjian Kinerja untuk Tingkat Kepala Perangkat Daerah dan Administrator/Fungsional Madya (Pencapaian Sasaran / Program) ditahun 2024 tidak mengalami perubahan target kinerja namun pada level target sub kegiatan ada sub kegiatan yang mengalami perubahan target yaitu sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi, Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Sub Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, Sub kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya, Sub Kegiatan Bimbingan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

Teknis kepada Pelaku Usaha serta Sub Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat telah menetapkan Perjanjian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat
Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Daerah	Jumlah Investasi PMDN/PMA	Rp. 99,75 Milyar
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82

- Sumber Data Perjanjian Kinerja (PK) DPMPSTSP Tahun 2024



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

Tabel 2.3

**Kerangka Pendanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat
Tahun 2024**

Uraian	Indikator	RKA PPAS	DPA Murni	DPA Perubahan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	2.348.432.482	2.453.603.300	2.271.286.688
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Penganggaran Daerah yang Disusun Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.354.000	18.680.400	18.680.400
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.942.048.382	2.096.224.000	1.891.382.388
Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD	6.953.000	6.952.800	6.952.800
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	24.138.900	24.138.600	24.138.600
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	110.910.700	98.435.200	106.935.200



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

	<p>Bangunan Kantor yang Disediakan</p> <p>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</p> <p>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan</p> <p>Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu</p> <p>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</p>			
<p>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</p>	<p>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</p>	30.800.000	20.800.000	30.650.000
<p>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p>	<p>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</p> <p>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</p> <p>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</p>	91.517.500	116.712.300	130.887.300
<p>Pemeliharaan Barang Milik Daerah</p>	<p>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang</p>	120.710.000	71.660.000	71.660.000



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

<p>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p>	<p>Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</p> <p>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</p> <p>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabili tasi</p>			
<p>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</p>	<p>Persentase Perizinan dan Non Perizinan yang Terbit sesuai dengan standar layanan</p>	<p>343.981.000</p>	<p>220.673.000</p>	<p>506.700.120</p>
<p>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</p>	<p>Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik</p> <p>Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non- Perizinan Penanaman Modal</p>	<p>343.981.000</p>	<p>220.673.000</p>	<p>506.700.120</p>



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Minat Investasi	388.000.000	350.000.000	350.000.000
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	388.000.000	350.000.000	350.000.000
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase pelaku usaha yang menyampaikan laporan pada tahun N-1	38.000.000	415.178.000	435.936.000
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	38.000.000	415.178.000	435.936.000
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Layanan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Yang Dapat Diakses dan Dipublikasikan	34.000.000	34.000.000	34.000.000



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

	Melalui Media Publikasi Website DPMPTSP			
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	34.000.000	34.000.000	34.000.000
Jumlah Total		3.152.413.482 ,-	3.473.454.300,-	3.597.922.808 ,-

- **Sumber Data RKA PPAS,DPA Murni,DPA Perubahan TA. 2024 DPMPTSP yang telah diolah oleh tim penyusun LKjIP DPMPTSP**



Target Kinerja Tahun 2024 Menurut Renstra

Target kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tertuang didalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP tahun 2024 – 2026, yang berguna untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Lampung Barat. Adapun target kinerja Dinas dapat dilihat didalam table berikut :

Tabel 2.4
Tujuan, Sasaran dan Target Kinerja

No	TUJUAN	SASARAN	2024 (Rp.)
1.	Meningkatnya Pertumbuhan Nilai Investasi Daerah	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Daerah	99,75 Milyar
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Sektor Perizinan Penanaman Modal	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	82

- Sumber Data Renstra DPMPTSP 2023-2026



BAB III

KAPASITAS ORGANISASI

A. Analisis Sumber Daya Manusia

Pegawai tentunya merupakan modal pokok dalam suatu organisasi karena menentukan berhasil atau tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya tergantung pada pegawai dalam melaksanakan tugas-tugas yang ada dalam organisasi tersebut. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat memiliki jumlah pegawai dengan perincian sebagai berikut :

1. Pegawai Negeri Sipil (PNS) : 18 Orang
2. Tenaga Harian Lepas (THLS) : 10 Orang

Tabel 3.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki – Laki	11
2	Perempuan	7

- Sumber Data Absensi DPMPTSP Tahun 2024 yang telah diolah oleh tim penyusun LKjIP DPMPTSP

Tabel 3.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah
1	IV	2
2	III	15
3	II	1

- Sumber Data Absensi DPMPTSP Tahun 2024 yang telah diolah oleh tim penyusun LKjIP DPMPTSP

Tabel 3.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jumlah
1	Eselon II.b	1
2	Eselon III.a/b	1
3	Eselon IV.a	1
4	Fungsional Madya	0
5	Fungsional Muda	5
6	JFU/Pelaksana	10

- Sumber Data Absensi DPMPTSP Tahun 2024 yang telah diolah oleh tim penyusun LKjIP DPMPTSP



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

Berdasarkan rekapitulasi dokumen evaluasi jabatan tahun 2024 jumlah kebutuhan pegawai di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yaitu 64 orang, dimana di Tahun 2024 jumlah ASN di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berjumlah 18 orang ini artinya kebutuhan pegawai masih kurang 46 orang, khususnya untuk jabatan fungsional madya di Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal.

B. Analisis Sarana dan Prasarana

Salah satu faktor pendukung pelayanan yang prima dalam penyelenggaraan pelayanan publik khususnya sektor perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat adalah tersedianya sarana dan prasarana penunjang kegiatan Dinas. Untuk meningkatkan pelayanan publik yang terintegrasi Pemerintah Kabupaten Lampung Barat melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah membentuk Mal Pelayanan Publik yang telah diresmikan oleh Kemendagri secara virtual pada tanggal 12 Desember 2024.

Tabel 3.4
Analisis Sarana dan Prasarana

NO	URAIAN	JUMLAH	KET
1	Kendaraan Roda 4	2	
2	Kendaraan Roda 2	8	
3	Komputer	9	
4	Laptop	6	
5	Proyektor	1	
6	Meja Kerja	21	
7	Kursi	23	
8	Filing Kabinet	5	
9	Lemari Kayu	2	
10	Telepon	1	
11	Papan Pengumuman	1	
12	Sofa	1	
13	Kursi tunggu	2	



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

14	Meja front office	1	
15	Meja Piket	1	
16	Absen Retina	2	
17	Brankas	1	
18	Meja Rapat	1	
18	Gedung /Kantor	2	

- *Sumber Data Daftar Inventaris Barang Tahun 2024 yang telah diolah oleh tim penyusun LKjIP DPMPTSP*

Secara umum sarana prasarana di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah memadai, namun untuk pengadaan kendaraan dinas operasional khususnya untuk mendukung pelayanan - pelayanan perizinan sangat dibutuhkan.

C. Analisis Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2024

Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2024 memiliki pagu anggaran sebesar Rp3.473.454.300,- yang kemudian mengalami perubahan anggaran menjadi sebesar Rp 3.597.922.808,- yang artinya mengalami penambahan pagu anggaran sebesar Rp 124.468.508,-. penambahan pagu anggaran pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Lampung Barat dimaksud guna meningkatkan pelayanan publik dengan (Pelaksanaan Mal Pelayanan Publik). Adapun rincian belanja setelah perubahan terdiri dari Belanja Operasi (Belanja Pegawai Rp.1.891.382.388,-, Belanja Barang dan Jasa Rp.1.223.804.420,-) serta Belanja Modal Rp.241.368.000,-.



BAB IV

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal Kabupaten Lampung Barat yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2023 - 2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

A. CAPAIAN KINERJA

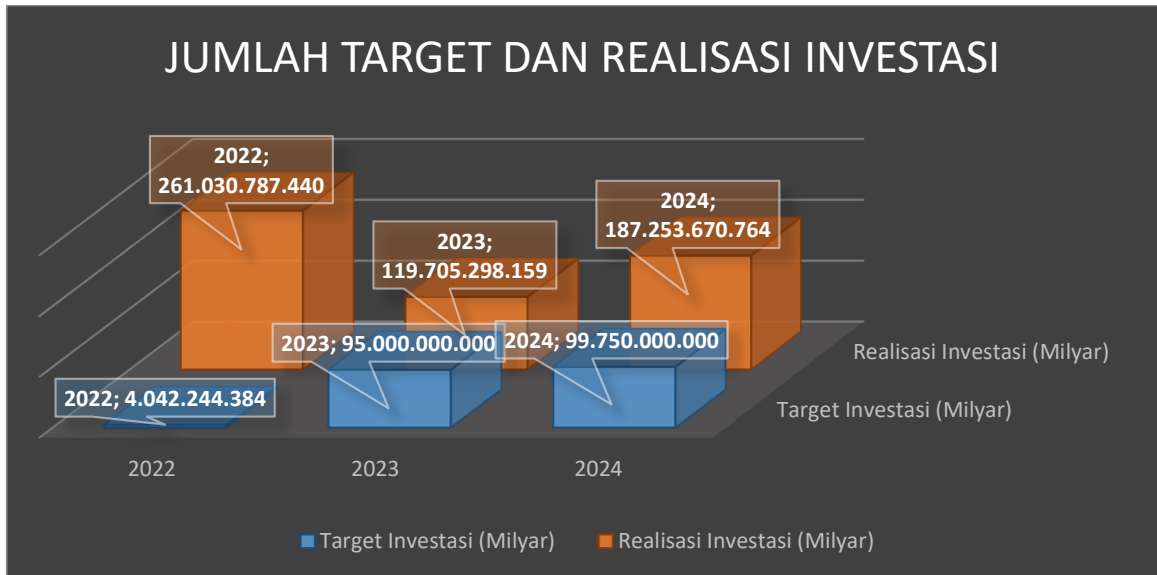
Dalam rangka untuk mengukur capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2024, maka hasil capaian kinerja pada tahun 2024 akan dibandingkan dengan capaian kinerja pada 2 tahun sebelumnya yaitu tahun 2023 dan 2024.

Hasil pengukuran capaian kinerja pada sasaran yang pertama yaitu **"Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Daerah dengan Indikator Jumlah Investasi PMA/PMDN"** di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat tahun 2024 dapat dilihat melalui grafik sebagai berikut :

Grafik 4.1

Perbandingan Capaian Kinerja



- **Sumber:** Sumber data Buku Data Layanan dan Profil Investasi 2024

Berdasarkan data realisasi Investasi / Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang disampaikan melalui Aplikasi OSS-RBA, untuk realisasi 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024, secara keseluruhan Investasi PMDN adalah sebesar Rp.187.253.670.764,- atau sudah melebihi target Investasi yaitu sebesar 188 %, yang didapat dari realisasi Investasi sampai dengan Triwulan IV, didapat dari Nilai Investasi pada 24 Pelaku Usaha Non UMK dan 10 Pelaku Usaha UMK.

Tabel 4.2

Rekapitulasi Realisasi Investasi Tahun 2024

No.	Periode Laporan	UMK (Rp.)	NON UMK (Rp.)	TOTAL (Rp.)
1	Triwulan I	-	102.809.435.078	
2	Triwulan II	786.140.940	22.541.056.396	
3	Triwulan III	-	22.842.091.734	
4	Triwulan IV	6.692.825.126	31.582.121.490	
Jumlah		7.478.966.066	179.774.704.698	187.253.670.764

- Sumber data Buku Data Layanan dan Profil Investasi 2024



Dari data LKPM yang disampaikan oleh Pelaku Usaha Non UMK, total realisasi investasi yang sudah masuk ke Kabupaten Lampung Barat sebesar Rp.179.774.704.698,- sementara untuk realisasi investasi yang sudah masuk dari Pelaku Usaha UMK sebesar Rp 7.478.966.066,-

1. Analisis Faktor Pendukung Keberhasilan

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, berusaha memberikan kemudahan bagi investor untuk menanamkan investasinya di Lampung Barat dengan meningkatkan layanan penanaman modal secara terintegrasi serta meningkatkan kapasitas SDM dalam pemanfaatan semua aplikasi perizinan dan melaksanakan program promosi penanaman modal di tingkat provinsi Lampung guna mempromosikan potensi-potensi unggulan dan produk-produk UMKM yang ada di Kabupaten Lampung Barat. Selain hal tersebut dilaksanakan pembinaan/bimbingan teknis terhadap pelaku usaha diberbagai sektor industri serta pelaksanaan pemantauan /pengawasan penanaman modal kepada pelaku usaha melalui program pengendalian penanaman modal.

2. Analisis Faktor Faktor Penghambat Keberhasilan

Belum adanya kebijakan terkait kemudahan pengembangan iklim investasi merupakan salah satu tantangan tersendiri meskipun capaian nilai Investasi setiap tahunnya melebihi target rencana yang telah ditetapkan , guna semakin memudahkan dan memberikan akses yang mudah dan luas maka perlu disusun kebijakan mengenai kemudahan investasi dan kemudahan berusaha di Kabupaten Lampung Barat untuk mendorong minat investor dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya akan menurunkan angka pengangguran. Saat ini Pemerintah Kabupaten Lampung Barat sedang dalam tahapan penyusunan Draft Ranperda Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi melalui inisiatif dewan. Realisasi Investasi Tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp.187.253.670.764,- dibandingkan tahun 2023.



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

Capaian kinerja tersebut tidak lepas dari dukungan Perangkat Daerah lainnya maupun pihak lain yang tergambar pada relasi peta proses bisnis sebagai berikut :

Tabel 4.3
PETA RELASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

MENINGKATNYA PERTUMBUHAN INVESTASI DAERAH			
DPMPTSP – 02.01 Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	DPMPTSP – 02.02 Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	DPMPTSP – 02.03 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	DPMPTSP – 02.04 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
<ol style="list-style-type: none"> 1. DPMPTSP 2. Bagian Hukum 3. DPRD Kab. Lampung Barat 4. Pihak Ketiga 5. Inspektorat 6. Bupati 	<ol style="list-style-type: none"> 1. DPMPTSP 2. Bagian Hukum 3. DPRD Kab. Lampung Barat 4. Inspektorat 5. Bupati 	<ol style="list-style-type: none"> 1. DPMPTSP 2. Bagian Perekonomian 3. Inspektorat 4. Bupati 	<ol style="list-style-type: none"> 1. DPMPTSP 2. Pihak Ketiga 3. Inspektorat 4. Bupati 5. Kementerian BKPM
DPMPTSP – 02.05 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Penanaman Modal	DPMPTSP – 02.06 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Penanaman Modal	DPMPTSP – 02.07 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Penanaman Modal	DPMPTSP – 02.08 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
<ol style="list-style-type: none"> 1. DPMPTSP 2. Dinas Kesehatan 3. DISDIKBUD 4. DISPORAPAR 5. DISBUNNAK 6. Dinas Perikanan 7. DISKOPERIND AG 8. Dinas TPH 9. Inspektorat 10. Bupati 	<ol style="list-style-type: none"> 1. DPMPTSP 2. Dinas Kesehatan 3. DISDIKBUD 4. DISPORAPAR 5. DISBUNNAK 6. Dinas Perikanan 7. DISKOPERIND AG 8. Dinas TPH 9. Inspektorat 10. Bupati 	<ol style="list-style-type: none"> 1. DPMPTSP 2. Dinas Kesehatan 3. DISDIKBUD 4. DISPORAPAR 5. DISBUNNAK 6. Dinas Perikanan 7. DISKOPERINDA G 8. Dinas TPH 9. Inspektorat 10. Bupati 	<ol style="list-style-type: none"> 1. DPMPTSP 2. BPS Kab. Lampung Barat 3. Inspektorat 4. DPMPTSP Prov. Lampung 5. Bupati

• Sumber Data Peta Proses Bisnis DPMPTSP Tahun 2024

Selanjutnya, Hasil pengukuran capaian kinerja pada sasaran yang kedua yaitu **”Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan”** di Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat tahun 2024 dapat dilihat melalui tabel sebagai berikut :

Tabel 4.4
Perbandingan Capaian Kinerja

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		%	Tahun 2024		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Predikat	79	90,64	114	82	92,69	113

- Sumber Data Hasil Survey Kepuasan Masyarakat DPMPTSP Tahun 2024

Berdasarkan data dari table diatas hasil realisasi IKM di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat selalu mengalami peningkatan dalam periode 2023-2024. Hal ini disebabkan karena adanya dukungan system online yang terintegrasi elektronik sehingga dapat memudahkan proses pelayanan perizinan.

Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan responden pemohon/pelaku usaha yang telah dilayani. Masyarakat pelaku usaha dapat mengakses Survey melalui online / memindai *barcode* dibawah ini :



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)

Untuk meningkatkan kualitas Layanan Perizinan dan Non Perizinan bagi Masyarakat, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Drs. Nakman, M.M.
Pl. BUPATI LAMPUNG BARAT



Berdasarkan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 3 tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati di Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jenis kewenangan Perizinan dan Non perizinan yang didelegasikan meliputi :



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

- a. Perizinan berusaha Berbasis Risiko berKBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) : 1245 jenis
- b. Perizinan Berusaha non KBLI : 39 jenis
- c. Perizinan Nonberusaha non KBLI : 6 jenis
- d. Nonperizinan : 6 jenis

Sejak tanggal 7 Agustus 2021, layanan perizinan yang sebelumnya dilaksanakan melalui aplikasi *Online Single Submission* (OSS) Versi 1.1 dialihkan ke aplikasi *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS-RBA) sebagaimana diatur dalam **Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko**. Layanan Perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilaksanakan melalui 4 (Empat) aplikasi yaitu :

1. Aplikasi OSS-RBA <https://oss.go.id>
2. Aplikasi SiCantik Cloud.go.id
3. SIMBG pada link <https://simbg.pu.go.id/>
4. mppdigital.go.id

Realisasi penerbitan perizinan berusaha dan non berusaha di tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.5
Realisasi Penerbitan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha**

No	Jenis Layanan Perizinan	Realisasi Penerbitan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha				
		Trw. I	Trw. II	Trw. III	Trw. IV	Jumlah
1	<i>Online Single Submission (OSS)</i>	1.994	636	539	546	3.715
2	<i>SiCantik Cloud</i>	232	89	34	19	374
3	<i>Simbg (PBG dan SLF)</i>	7	11	14	7	39
4	<i>MPP Digital</i>	2	53	83	97	235
Jumlah Total						4.363

- Sumber data Buku Data Layanan dan Profil Investasi 2024 yang telah diolah oleh Tim Penyusun LKjIP

1. Analisis Faktor Pendukung Keberhasilan

Guna meningkatkan pelayanan publik yang terintegrasi Pemerintah Kabupaten Lampung Barat melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan



Terpadu Satu Pintu telah membentuk Mal Pelayanan Publik yang telah diresmikan oleh Kemendagri secara virtual pada tanggal 12 Desember 2024.

Mal Pelayanan Publik sendiri berada di Tugu Liwa dengan 8 (delapan) Instansi yang telah tergabung yaitu DPMPTSP, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, Kementerian Agama, Pengadilan Agama, Badan Pusat Statistik, dan BPJS Kesehatan. Selain itu dengan berkembangnya teknologi informatika maka pelayanan publik oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat terus melakukan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) untuk secara langsung dapat menerapkan dan mengimplementasikan pemanfaatan semua aplikasi terkait layanan perizinan, melaksanakan layanan perizinan sesuai dengan standar layanan, SOP yang telah disusun, bersama dengan tim teknis terkait berkewajiban dan bertanggungjawab untuk ikut serta dalam melakukan pembinaan teknis dan pengawasan atas pengelolaan perizinan dan non perizinan sesuai dengan bidang tugasnya .

2. Analisis Faktor Faktor Penghambat Keberhasilan

Masih adanya paradigma sebagian masyarakat yang menganggap dalam mengurus perizinan merupakan sesuatu hal yang sulit dikarenakan masyarakat belum sepenuhnya memahami cara memanfaatkan aplikasi layanan perizinan dan nonperizinan yang tersedia/secara *online* serta pemenuhan/perbaikan sarana ruang pelayanan pada Mal Pelayanan Publik baik di area *front office*, *back office*, ruang tunggu maupun beberapa sarana pendukung lainnya (kendaraan operasional perizinan). Untuk mengatasi hal tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terus berupaya meningkatkan sosialisasi pelayanan perizinan berusaha maupun non berusaha baik secara layanan konsultasi langsung maupun melalui media website, surat kabar, serta pelayanan perizinan keliling ke kecamatan-kecamatan yang terintegrasi dengan pelaksanaan musrenbang kecamatan disetiap tahunnya.



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

Capaian kinerja tersebut tidak lepas dari dukungan Perangkat Daerah lainnya maupun pihak lain yang tergambar pada relasi peta proses bisnis sebagai berikut :

Tabel 4.6
PETA RELASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan		
DPMPPTSP - 01.34 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	DPMPPTSP - 01.35 Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non-Perizinan Penanaman Modal	DPMPPTSP - 01.36 Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan
<ol style="list-style-type: none">1. DPMPPTSP2. Bagian SDA & Naker3. DISDIKBUD4. DISBUNNAK5. DINKES6. Dinas PUPR7. Dinas Sosial8. Dinas Lingkungan Hidup9. Dinas Perhubungan10. DISKOMINFO11. Dinas Perikanan12. DISPORAPAR13. Dinas TPH14. Dinas Koperindag15. Inspektorat16. Bupati	<ol style="list-style-type: none">1. DPMPPTSP2. Pemohon3. Inspektorat4. Ombudsman5. KemenPAN RB6. KPK7. Polres Lampung Barat8. Kejaksaan Lambar9. Pengadilan Tinggi10. Bupati	<ol style="list-style-type: none">1. DPMPPTSP2. Pemohon3. Inspektorat4. Bupati

Sumber Data Peta Proses Bisnis DPMPPTSP Tahun 2024



B. PERBANDINGAN KINERJA

1. Perbandingan Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Untuk melihat perbandingan hasil capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2023 dan tahun 2024 dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 4.7
Perbandingan Kinerja

SASARAN	INDIKATOR	2023	2024
Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Daerah	Jumlah Investasi PMDN/PMA	119.705.298.159	187.253.670.764
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90,64	92,69

- Sumber data Buku Data Layanan dan Profil Investasi 2024 yang telah diolah oleh Tim Penyusun LKjIP

Berdasarkan data dari tabel diatas pada sasaran (1) Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Daerah, hasil capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat pada Tahun 2024 mengalami peningkatan realisasi investasi sebesar Rp.67.548.372.605,- dari capaian realisasi investasi dari tahun 2023 .

Sementara untuk sasaran (2) hasil capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat mengalami peningkatan pada kualitas pelayanan perizinan yang dapat dilihat dari IKM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Hal ini disebabkan karena adanya pengalihan pelayanan perizinan ke Mall Pelayanan



Publik serta adanya dukungan sistem online yang terintegrasi secara elektronik sehingga dapat memudahkan proses pelayanan perizinan.

2. Perbandingan Kinerja Tahun 2024 dengan Target Nasional & Provinsi Lampung

Secara nasional Kementerian Investasi/BKPM menargetkan kepada Provinsi Lampung pada tahun 2024 jumlah realisasi investasi sebesar Rp 175 Milyar dan target investasi Renstra DPMPTSP Kabupaten Lampung Barat sebesar Rp 99,750 Milyar. Untuk realisasi investasi di Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2024 terealisasi sebesar Rp.187.253.670.764,- sehingga dapat disimpulkan bahwa realisasi investasi Kabupaten Lampung Barat terhadap Renstra mencapai 187,72 %, sementara realisasi investasi terhadap target BKPM/Provinsi Lampung mencapai 107 %.

4. Benchmarking

Provinsi Lampung menargetkan realisasi investasi di tahun 2024 untuk Kabupaten Lampung Barat sebesar Rp. 175 Milyar. Capaian kinerja DPMPTSP Tahun 2024 dengan berpedoman pada target investasi dari provinsi melampaui target yang telah ditetapkan baik dari realisasi investasi yang mencapai 107% maupun indeks kepuasan masyarakat penerima layanan sebesar 92,69 dengan predikat A berdasarkan Survey Kepuasan Masyarakat dengan 537 responden penerima layanan berdasarkan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

C. REALISASI ANGGARAN

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat pada Tahun 2024 melaksanakan berbagai program, kegiatan dan sub kegiatan dengan jumlah program termasuk program rutin setelah perubahan sebanyak 5 (Lima) program dan jumlah kegiatan termasuk kegiatan rutin setelah perubahan sebanyak 12 (Dua belas) kegiatan dan jumlah Sub kegiatan termasuk Sub kegiatan rutin setelah refocusing sebanyak 35 sub kegiatan. Alokasi dana tahun 2024 untuk Belanja Operasi setelah perubahan sebesar Rp.3.597.922.808,- terealisasi sebesar



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

Rp.3.322.819.418,- atau 92,35%, sementara untuk capaian kinerja seluruh sub kegiatan yang dilaksanakan telah tercapai 100 %.

Realisasi penyerapan anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

Tabel 4.8
Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2024

URAIAN	ANGGARAN JUMLAH	REALISASI JUMLAH	Bertambah/Berkurang	
			Rp	%
BELANJA DAERAH	3.597.922.808,00	3.322.819.418,00	275.103.390,00	92,35%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.271.286.688,00	2.067.429.476,00	203.857.212,00	91,02%
Perencanaan, Penggabungan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18.680.400,00	18.676.400,00	4.000,00	99,98%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.346.000,00	4.346.000,00	-	100,00%
Koordinasi dan Penyusunan RKA- SKPD	1.847.800,00	1.847.800,00	-	100,00%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.845.200,00	1.845.200,00	-	100,00%
Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	1.627.000,00	1.625.000,00	2.000,00	99,88%
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.759.800,00	1.759.800,00	-	100,00%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.254.800,00	2.252.800	2.000	99,91%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.999.800,00	4.999.800	-	100,00%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.891.382.388	1.718.384.015	172.998.373	90,85%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.882.451.388,00	1.709.455.015	172.996.373	90,81%



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.690.000,00	2.690.000	-	100,00%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semester SKPD	4.101.200,00	4.099.200	2.000	99,95%
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.139.800,00	2.139.800	-	100,00%
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	6.952.800	6.952.800	-	100,00%
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	6.952.800,00	6.952.800	-	100,00%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	14.138.600	14.088.600	50.000	99,65%
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4.138.600,00	4.088.600	50.000	98,79%
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10.000.000,00	10.000.000	-	100,00%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	106.935.200	106.168.127	767.073	99,28%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	2.678.000,00	2.678.000	-	100,00%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16.510.000,00	16.510.000	-	100,00%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.760.000,00	5.400.000	360.000	93,75%
Fasilitas Kunjungan Tamu	5.500.000,00	5.500.000	-	100,00%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	76.487.200,00	76.080.127	407.073	99,47%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	30.650.000	28.400.000	2.250.000	92,66%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.650.000,00	28.400.000	2.250.000	92,66%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	130.887.300	110.916.264	19.971.036	84,74%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.725.000,00	1.725.000	-	100,00%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36.734.800,00	17.415.264	19.319.536	47,41%



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	92.427.500,00	91.776.000	651.500	99,30%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	71.660.000	63.843.270	7.816.730	89,09%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	54.300.000,00	46.483.270	7.816.730	85,60%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.910.000,00	7.910.000	-	100,00%
Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.450.000,00	9.450.000	-	100,00%
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	350.000.000	341.823.987	8.176.013	97,66%
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	350.000.000	341.823.987	8.176.013	97,66%
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	350.000.000	341.823.987	8.176.013	97,66%
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	506.700.120	501.526.521	5.173.599	98,98%
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	506.700.120	501.526.521	5.173.599	98,98%
Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis resiko terintegrasi secara Elektronik	453.115.120	448.121.521	4.993.599	98,90%
Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	20.000.000	19.985.000	15.000	99,93%
Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	33.585.000	33.420.000	165.000	99,51%



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	435.936.000	379.438.975	56.497.025	87,04%
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	435.936.000	379.438.975	56.497.025	87,04%
Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	64.211.000	64.118.500	92.500	99,86%
Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	245.691.000	218.631.375	27.059.625	88,99%
Pengawasan Penanaman Modal	126.034.000	96.689.100	29.344.900	76,72%
PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	34.000.000	32.600.459	1.399.541	95,88%
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	34.000.000	32.600.459	1.399.541	95,88%
Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	34.000.000	32.600.459	1.399.541	95,88%

- Sumber data laporan realisasi anggaran TA. 2024 yang telah diolah oleh Tim Penyusun LKIP



Efisiensi Sumber Daya

Realisasi anggaran di tahun 2024, untuk mencapai sasaran pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai berikut :

Tabel 4.9
Efisiensi Sumber Daya

NO	SASARAN	ANGGARAN	REALISASI	%	KET.
1	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Daerah	Rp. 819.936.000,-	Rp. 753.863.421,-	92 %	Realisasi capaian kinerja fisik sebesar 187,72 %
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Rp. 2.777.986.808	Rp. 2.568.955.997,-	92 %	Realisasi capaian kinerja fisik sebesar 107%
T O T A L		Rp. 3.597.922.808,-	Rp. 3.322.819.418,-	92 %	

Sasaran 1 “Meningkatnya Jumlah Investasi di Lampung Barat” dengan realisasi capaian fisik sebesar 187,72 % , dengan penyerapan anggaran untuk sasaran 1 sebesar 92 %.

Sasaran 2 “Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan terpadu” dengan realisasi capaian fisik sebesar 107 % , dengan penyerapan anggaran untuk sasaran 2 sebesar 92 %

Selama tahun 2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat telah melakukan berbagai upaya efisiensi antara lain :

1. Mengoptimalkan Sumber Daya Manusia (SDM)
2. Sarana dan Prasarana kerja seperti penggunaan listrik, lampu, komputer, digunakan saat jam kerja dan setelah jam kerja selesai langsung dimatikan.
3. Alat tulis kantor digunakan sesuai dengan kebutuhan
4. Pemeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan operasional dilaksanakan secara rutin
5. Penggunaan sumber daya anggaran secara efektif dan efisien guna mendukung capaian sasaran OPD.

D. PEMANFAATAN LAPORAN KINERJA

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sangat bermanfaat bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat. Dengan adanya laporan ini maka dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tahun berjalan, sehingga dapat dijadikan bahan acuan untuk pelaksanaan kegiatan di tahun selanjutnya.

E. SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT PENGGUNA LAYANAN PUBLIK

Pada tahun 2024, untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan perizinan dan nonperizinan, masyarakat pelaku usaha dapat mengaksesnya melalui online / memindai *barcode* dibawah ini :



Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat dilaksanakan pada Januari – Desember 2024, Daftar pertanyaan yang disusun mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017, terdapat 9 (Sembilan) unsur yang relevan, valid dan reliabel sebagai unsur minimal yang harus ada untuk dasar pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat, unsur tersebut adalah :

1. Persyaratan
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur
3. Waktu Penyelesaian
4. Biaya/Tarif
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
6. Kompetensi Pelaksana
7. Perilaku Pelaksana
8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
9. Sarana dan Prasarana



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

Formulasi untuk menghitung Indeks Kepuasan Masyarakat adalah sebagai berikut :

$$IKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

NILAI PERSEPSI, NILAI INTERVAL, NILAI KONVERSI (NIK), MUTU PELAYANAN DAN KINERJA UNIT PELAYANAN

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1,00-2,5996	25,00-64,99	D	Tidak Baik
2	2,60-3,064	65,00-76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644- 3,532	76,61-88,30	B	Baik
4	3,5324-4,00	88,31-100,00	A	Sangat Baik

Selama periode Januari s.d Desember 2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.Lampung Barat telah melakukan empat kali survey kepuasan masyarakat, survey tersebut dilakukan kepada 537 orang. Adapun selama empat kali melakukan survey tersebut didapatkan nilai IKM sebagai berikut :

Tabel 4.10
Realisasi IKM Tahun 2024

Periode Survey	Nilai Konversi	Mutu Pelayanan
Januari sd Maret	92,91	A
April sd Juni	92,95	A
Juli sd September	92,18	A
Oktober sd Desember	92,74	A

Dari empat kali melakukan survey kepuasan masyarakat didapatkan nilai rata-rata kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat sebesar **92,69** atau secara mutu pelayanan berpredikat **A (Sangat Baik)**.



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

Untuk tahun 2024, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat mendapatkan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 92,69 dengan predikat A. Hal ini menunjukkan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat dalam pelayanan public khususnya sektor perizinan, namun kedepannya kualitas pelayanan public di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat dapat ditingkatkan lebih baik lagi.



BAB V PENUTUP

A. SIMPULAN UMUM

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang mampu beradaptasi dalam segala situasi disrupsi saat ini dengan tetap dapat memberikan pelayanan yang mudah bagi masyarakat (*Agile Governance*) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Lampung Barat Tahun 2024. Pembuatan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKjIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Dalam tahun 2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat menetapkan sebanyak 2 (Dua) sasaran dengan 2 (Dua) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kerja Tahun 2024 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 187,72%
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 107 %

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 2 sasaran tersebut, secara umum telah mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dalam Tahun Anggaran 2024 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2024 setelah perubahan sebesar



Rp.3.597.922.808,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp.3.322.819.418,, dengan demikian dapat dikatakan pada tahun 2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat kondisi anggaran adalah Silpa Rp.275.103.390,-

Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut telah menggunakan anggaran sebesar Rp.3.322.819.418,- dan telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian sasaran dan tujuan Kabupaten Lampung Barat. Berdasarkan pagu anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat adalah 92 % dari anggaran yang direncanakan, hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian sasaran dan tujuan Kabupaten Lampung Barat.

B. FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan pada tahun 2024 tidak lepas dari berbagai faktor pendukung yang membantu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam mencapai target dan sasaran kinerja. Berbagai faktor pendukung tersebut diantaranya peluang investasi yang besar dengan tersedianya infrastruktur yang memadai serta dukungan system pelayanan perizinan yang sudah terintegrasi secara elektronik sehingga memudahkan pelayanan perizinan.

Adanya peningkatan kesadaran pelaku usaha dalam pengurusan perizinan dan non-perizinan hal ini tidak lepas dari pelaksanaan sosialisasi baik melalui publikasi media surat kabar, website, layanan konsultasi langsung maupun pelayanan perizinan keliling ke kecamatan – kecamatan yang terintegrasi dengan pelaksanaan musrenbang kecamatan.

C. PERMASALAHAN

Pada pelaksanaan kegiatan tahun 2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tidak lepas dari permasalahan yang cukup menghambat capaian kinerja Dinas, beberapa isu-isu permasalahan yang terjadi adalah



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

kurangnya kuantitas dan kualitas tenaga pelayanan, sarana prasarana baik di Mall Pelayanan Publik maupun kendaraan operasional dalam rangka pelayanan perizinan serta belum tersedianya peraturan yang mengatur tentang iklim investasi di Kabupaten Lampung Barat.

D. REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT

Berdasarkan hasil capaian kinerja yang dicapai selama tahun 2024, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat diharapkan bisa menyusun perencanaan dengan lebih baik agar pelaksanaan kegiatan bisa terlaksana dengan efektif dan efisien, selanjutnya dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas pegawai sebagai tenaga pelayanan di sektor perizinan serta membentuk peraturan yang mengatur iklim investasi agar dapat menarik minat investor di Kabupaten Lampung Barat.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholders* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Lampung Barat.

Lampung Barat, 20 Januari 2025
**Pit. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,**


Ir. SUGENG RAHARJO, M.T
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19650916 199402 1 002



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Tabel. I
Evaluasi Rencana Aksi Tingkat Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Periode 2023 - 2026
Tahun 2024

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tujuan Akumulatif				Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja Sasaran Akumulatif				Nama Jabatan Penanggung Jawab
			Trw 1	Trw 2	Trw 3	Trw 4			Trw 1	Trw 2	Trw 3	Trw 4	
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Sektor Perizinan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82	82	82	82	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82	82	82	82	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	Meningkatnya Pertumbuhan Nilai Investasi Daerah	Jumlah Investasi PMDN/PMA	Rp 25.000.000.000	Rp 50.000.000.000	Rp 75.000.000.000	Rp 99.750.000.000	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Daerah	Jumlah Investasi PMDN/PMA	Rp 25.000.000.000	Rp 50.000.000.000	Rp 75.000.000.000	Rp 99.750.000.000	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Liwa, 08 Januari 2024
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.



Drs. DAMAN NASIR, M.P
NIP. 19680701 198901 1 002

Tabel. I
Evaluasi Rencana Aksi Tingkat Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Periode 2023 - 2026
Tahun 2024

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tujuan Akumulatif				Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja Sasaran Akumulatif				Nama Jabatan Penanggung Jawab
			Trw 1	Trw 2	Trw 3	Trw 4			Trw 1	Trw 2	Trw 3	Trw 4	
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Sektor Perizinan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82	82	82	82	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82	82	82	82	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	Meningkatnya Pertumbuhan Nilai Investasi Daerah	Jumlah Investasi PMDN/PMA	Rp 25.000.000.000	Rp 50.000.000.000	Rp 75.000.000.000	Rp 99.750.000.000	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Daerah	Jumlah Investasi PMDN/PMA	Rp 25.000.000.000	Rp 50.000.000.000	Rp 75.000.000.000	Rp 99.750.000.000	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Liwa, 08 Januari 2024
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.



Drs. DAMAN NASIR, M.P
NIP. 19680701 198901 1 002

Tabel 3
Evaluasi Rencana Aksi Tingkat Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Periode 2023-2026
Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Kinerja Per triwulan Akumulatif		Keuangan Per triwulan Akumulatif		Nama Jabatan Penanggung Jawab
					Target	Target	Target	Target	
1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Trw 1 =	2 Dokumen	Trw 1 =	Rp 2.085.000	Sekretaris
					Trw 2 =	4 Dokumen	Trw 2 =	Rp 2.085.000	
					Trw 3 =	6 Dokumen	Trw 3 =	Rp 4.346.000	
					Trw 4 =	8 Dokumen	Trw 4 =	Rp 4.346.000	
				Jumlah Dokumen Penganggaran Daerah yang Disusun	Trw 1 =	1 Dokumen	Trw 1 =	Rp 1.845.200	
					Trw 2 =	2 Dokumen	Trw 2 =	Rp 3.693.000	
					Trw 3 =	2 Dokumen	Trw 3 =	Rp 3.693.000	
					Trw 4 =	4 Dokumen	Trw 4 =	Rp 7.079.800	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Trw 1 =	3 Laporan	Trw 1 =	Rp 435.000		
				Trw 2 =	6 Laporan	Trw 2 =	Rp 2.519.800		
				Trw 3 =	10 Laporan	Trw 3 =	Rp 5.369.600		
				Trw 4 =	13 Laporan	Trw 4 =	Rp 7.254.600		
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Trw 1 =	22 Orang	Trw 1 =	Rp 483.894.572	
					Trw 2 =	22 Orang	Trw 2 =	Rp 1.205.667.715	
					Trw 3 =	22 Orang	Trw 3 =	Rp 1.664.258.839	
					Trw 4 =	22 Orang	Trw 4 =	Rp 2.087.293.000	
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Trw 1 =	0 Laporan		Trw 1 =	Rp -				
	Trw 2 =	0 Laporan		Trw 2 =	Rp -				
	Trw 3 =	0 Laporan		Trw 3 =	Rp -				

		Trw 4 = 1 Laporan	Trw 4 = Rp 2.690.000	Sekretaris
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Twirulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Twirulanan/Semesteran SKPD	Trw 1 = 4 Laporan	Trw 1 = Rp 1.795.000	
		Trw 2 = 8 Laporan	Trw 2 = Rp 2.811.200	
		Trw 3 = 14 Laporan	Trw 3 = Rp 3.721.200	
		Trw 4 = 17 Laporan	Trw 4 = Rp 4.101.200	
	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Reliasasi Anggaran	Trw 1 = 0 Dokumen	Trw 1 = Rp -	
		Trw 2 = 1 Dokumen	Trw 2 = Rp 2.139.800	
		Trw 3 = 1 Dokumen	Trw 3 = Rp 2.139.800	
		Trw 4 = 1 Dokumen	Trw 4 = Rp 2.139.800	
Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD	Trw 1 = 1 Dokumen	Trw 1 = Rp 810.000	
		Trw 2 = 1 Dokumen	Trw 2 = Rp 5.332.800	
		Trw 3 = 1 Dokumen	Trw 3 = Rp 6.142.800	
		Trw 4 = 1 Dokumen	Trw 4 = Rp 6.952.800	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Trw 1 = 0 Dokumen	Trw 1 = Rp -	Sekretaris
		Trw 2 = 1 Dokumen	Trw 2 = Rp 3.438.600	
		Trw 3 = 1 Dokumen	Trw 3 = Rp 3.438.600	
		Trw 4 = 1 Dokumen	Trw 4 = Rp 4.138.600	
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Trw 1 = 0 Orang	Trw 1 = Rp -	
		Trw 2 = 2 Orang	Trw 2 = Rp 10.000.000	
		Trw 3 = 4 Orang	Trw 3 = Rp 20.000.000	
		Trw 4 = 4 Orang	Trw 4 = Rp 20.000.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Trw 1 = 1 Paket	Trw 1 = Rp 1.544.000	
		Trw 2 = 1 Paket	Trw 2 = Rp 1.544.000	
		Trw 3 = 2 Paket	Trw 3 = Rp 2.678.000	
		Trw 4 = 2 Paket	Trw 4 = Rp 2.678.000	
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Trw 1 = 1 Paket	Trw 1 = Rp 3.292.000	
		Trw 2 = 1 Paket	Trw 2 = Rp 7.780.000	
		Trw 3 = 1 Paket	Trw 3 = Rp 11.268.000	

Meningkatnya Kualitas
Pelayanan Perizinan

		Trw 4 = 1 Paket	Trw 4 = Rp 16.510.000
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Trw 1 = 5 Dokumen	Trw 1 = Rp 1.440.000
		Trw 2 = 5 Dokumen	Trw 2 = Rp 2.880.000
		Trw 3 = 5 Dokumen	Trw 3 = Rp 4.320.000
		Trw 4 = 5 Dokumen	Trw 4 = Rp 5.760.000
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Trw 1 = 3 Laporan	Trw 1 = Rp 1.639.000
		Trw 2 = 6 Laporan	Trw 2 = Rp 3.472.000
		Trw 3 = 9 Laporan	Trw 3 = Rp 5.260.000
		Trw 4 = 12 Laporan	Trw 4 = Rp 5.500.000
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Trw 1 = 3 Laporan	Trw 1 = Rp 8.575.000
		Trw 2 = 6 Laporan	Trw 2 = Rp 36.854.000
		Trw 3 = 9 Laporan	Trw 3 = Rp 56.892.200
		Trw 4 = 12 Laporan	Trw 4 = Rp 67.987.200

Sekretaris

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Trw 1 = 8 Unit	Trw 1 = Rp 20.800.000	Sekretaris
		Trw 2 = 8 Unit	Trw 2 = Rp 20.800.000	
		Trw 3 = 8 Unit	Trw 3 = Rp 20.800.000	
		Trw 4 = 8 Unit	Trw 4 = Rp 20.800.000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Trw 1 = 3 Laporan	Trw 1 = Rp 1.085.000	Sekretaris
		Trw 2 = 6 Laporan	Trw 2 = Rp 1.085.000	
		Trw 3 = 9 Laporan	Trw 3 = Rp 1.725.000	
		Trw 4 = 12 Laporan	Trw 4 = Rp 1.725.000	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Trw 1 = 3 Laporan	Trw 1 = Rp 6.060.000	
		Trw 2 = 6 Laporan	Trw 2 = Rp 11.790.000	
		Trw 3 = 9 Laporan	Trw 3 = Rp 17.774.800	
		Trw 4 = 12 Laporan	Trw 4 = Rp 22.559.800	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Trw 1 = 3 Laporan	Trw 1 = Rp 24.431.000	
		Trw 2 = 6 Laporan	Trw 2 = Rp 43.246.000	
		Trw 3 = 9 Laporan	Trw 3 = Rp 71.511.500	
		Trw 4 = 12 Laporan	Trw 4 = Rp 92.427.500	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Trw 1 = 3 Unit	Trw 1 = Rp 24.637.500	Sekretaris
		Trw 2 = 6 Unit	Trw 2 = Rp 34.025.000	
		Trw 3 = 9 Unit	Trw 3 = Rp 44.662.500	
		Trw 4 = 11 Unit	Trw 4 = Rp 54.300.000	
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Trw 1 = 3 Unit	Trw 1 = Rp 2.230.000	
		Trw 2 = 6 Unit	Trw 2 = Rp 5.070.000	
		Trw 3 = 9 Unit	Trw 3 = Rp 7.910.000	
		Trw 4 = 11 Unit	Trw 4 = Rp 7.910.000	
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Trw 1 = 0 Unit	Trw 1 = Rp -	
		Trw 2 = 1 Unit	Trw 2 = Rp 9.450.000	
		Trw 3 = 1 Unit	Trw 3 = Rp 9.450.000	
		Trw 4 = 1 Unit	Trw 4 = Rp 9.450.000	

		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi Secara Elektronik	Trw 1 = 300 Pelaku Usaha	Trw 1 = Rp 47.249.000	Analisis Kebijakan Ahli Muda (Koordinator PTSP)		
					Trw 2 = 800 Pelaku Usaha	Trw 2 = Rp 130.663.000			
					Trw 3 = 1200 Pelaku Usaha	Trw 3 = Rp 149.907.000			
					Trw 4 = 1500 Pelaku Usaha	Trw 4 = Rp 167.088.000			
				Jumlah kegiatan usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis resiko lintas daerah kabupaten/kota bagi kegiatan usaha dari pelaku usaha	Trw 1 = 5 Kegiatan Usaha	Trw 1 = Rp 5.374.000			
					Trw 2 = 10 Kegiatan Usaha	Trw 2 = Rp 14.741.000			
					Trw 3 = 20 Kegiatan Usaha	Trw 3 = Rp 25.200.000			
					Trw 4 = 30 Kegiatan Usaha	Trw 4 = Rp 33.585.000			
			Jumlah Pelaku usaha yang memperoleh layanan konsultasi perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis resiko terintegrasi secara elektronik	Trw 1 = 50 Kegiatan Usaha	Trw 1 = Rp 6.063.000				
				Trw 2 = 80 Kegiatan Usaha	Trw 2 = Rp 10.723.500				
				Trw 3 = 110 Kegiatan Usaha	Trw 3 = Rp 16.257.000				
				Trw 4 = 150 Kegiatan Usaha	Trw 4 = Rp 20.000.000				
2	Meningkatnya Jumlah Investasi di Lampung Barat		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Trw 1 = 0 Dokumen		Trw 1 = Rp 410.000	Asesor Manajemen Mutu Industri Ahli Muda (Koordinator Penanaman Modal)
						Trw 2 = 1 Dokumen		Trw 2 = Rp 283.135.000	
						Trw 3 = 1 Dokumen		Trw 3 = Rp 350.000.000	
						Trw 4 = 1 Dokumen		Trw 4 = Rp 350.000.000	
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Trw 1 = 0 Pelaku Usaha	Trw 1 = Rp 8.100.000	Asesor Manajemen Mutu Industri Ahli Muda (Koordinator Penanaman Modal)		
					Trw 2 = 86 Pelaku Usaha	Trw 2 = Rp 150.157.000			
					Trw 3 = 172 Pelaku Usaha	Trw 3 = Rp 276.212.500			
					Trw 4 = 172 Pelaku Usaha	Trw 4 = Rp 300.000.000			
				Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	Trw 1 = 3 Kegiatan Usaha	Trw 1 = Rp 6.055.000			
					Trw 2 = 6 Kegiatan Usaha	Trw 2 = Rp 53.640.000			
					Trw 3 = 9 Kegiatan Usaha	Trw 3 = Rp 79.084.000			

				Trw 4 =	11	Kegiatan Usaha	Trw 4 =	Rp	115.178.000		
		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Trw 1 =	0	Dokumen	Trw 1 =	Rp	11.475.000	Asesor Manajemen Mutu Industri Ahli Muda (Koordinator Penanaman Modal)
				Trw 2 =	0	Dokumen	Trw 2 =	Rp	17.947.500		
				Trw 3 =	0	Dokumen	Trw 3 =	Rp	24.920.000		
				Trw 4 =	1	Dokumen	Trw 4 =	Rp	34.000.000		

Liwa, 08 Januari 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,**



**Drs. DAMAN NASIR, M.P.
NIP. 19680701 198901 002**

Tabel 4
Evaluasi Rencana Aksi Tingkat Sub Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Periode 2023-2026
Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kinerja Per triwulan Akumulatif		Keuangan Per triwulan Akumulatif		Nama Jabatan Penanggung Jawab					
							Target		Target							
1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusnya Dokumen Perencanaan SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD	Trw 1 =	2	Dokumen	Trw 1	Rp	2.085.000	Kasubbag Umum & Perencanaan			
							=			=				Trw 2	Rp	2.085.000
							Trw 3 =	6	Dokumen	Trw 3	Rp	4.346.000				
							=			=				Trw 4	Rp	4.346.000
				Kordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Trw 1 =	0	Dokumen	Trw 1	Rp	-	Kasubbag Umum & Perencanaan			
							=			=				Trw 2	Rp	1.847.800
							Trw 3 =	1	Dokumen	Trw 3	Rp	1.847.800				
							=			=				Trw 4	Rp	1.847.800
				Kordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Trw 1 =	1	Dokumen	Trw 1	Rp	1.845.200	Kasubbag Umum & Perencanaan			
							=			=				Trw 2	Rp	1.845.200
							Trw 3 =	1	Dokumen	Trw 3	Rp	1.845.200				
							=			=				Trw 4	Rp	1.845.200
				Kordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Trw 1 =	0	Dokumen	Trw 1	Rp	-	Kasubbag Umum & Perencanaan			
							=			=				Trw 2	Rp	-
							Trw 3 =	0	Dokumen	Trw 3	Rp	-				
							=			=				Trw 4	Rp	1.627.000
				Kordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Trw 1 =	0	Dokumen	Trw 1	Rp	-	Kasubbag Umum & Perencanaan			
							=			=				Trw 2	Rp	-
							Trw 3 =	0	Dokumen	Trw 3	Rp	-				
							=			=				Trw 4	Rp	1.759.800
				Kordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Trw 1 =	0	Laporan	Trw 1	Rp	-	Kasubbag Umum & Perencanaan			
							=			=				Trw 2	Rp	-
							Trw 3 =	1	Laporan	Trw 3	Rp	1.239.800				
							=			=				Trw 4	Rp	2.254.800
				Evaluasi Kinerja Perangkat	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Trw 1 =	3	Laporan	Trw 1	Rp	435.000	Kasubbag Umum & Perencanaan			
							=			=				Trw 2	Rp	2.519.800
							Trw 3 =	9	Laporan	Trw 3	Rp	4.129.800				
							=			=				Trw 4	Rp	4.999.800

Meningkatnya
Kualitas Pelayanan
Perizinan

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Trw 1 = 22 Orang	Trw 1 Rp 483.894.572 =	Analisis Keuangan Pusat / Daerah
				Trw 2 = 22 Orang	Trw 2 Rp 1.205.667.715 =	
				Trw 3 = 22 Orang	Trw 3 Rp 1.664.258.839 =	
				Trw 4 = 22 Orang	Trw 4 Rp 2.087.293.000 =	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Trw 1 = 0 Laporan	Trw 1 Rp - =	Analisis Keuangan Pusat / Daerah
				Trw 2 = 0 Laporan	Trw 2 Rp - =	
				Trw 3 = 0 Laporan	Trw 3 Rp - =	
				Trw 4 = 1 Laporan	Trw 4 Rp 2.690.000 =	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Trw 1 = 4 Laporan	Trw 1 Rp 1.795.000 =	Analisis Keuangan Pusat / Daerah
				Trw 2 = 8 Laporan	Trw 2 Rp 2.811.200 =	
				Trw 3 = 14 Laporan	Trw 3 Rp 3.721.200 =	
				Trw 4 = 17 Laporan	Trw 4 Rp 4.101.200 =	
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Trw 1 = 0 Dokumen	Trw 1 Rp - =	Analisis Keuangan Pusat / Daerah	
			Trw 2 = 1 Dokumen	Trw 2 Rp 2.139.800 =		
			Trw 3 = 1 Dokumen	Trw 3 Rp 2.139.800 =		
			Trw 4 = 1 Dokumen	Trw 4 Rp 2.139.800 =		
Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD	Trw 1 = 1 Dokumen	Trw 1 Rp 810.000 =	Kasubbag Umum & Perencanaan
				Trw 2 = 1 Dokumen	Trw 2 Rp 5.332.800 =	
				Trw 3 = 1 Dokumen	Trw 3 Rp 6.142.800 =	
				Trw 4 = 1 Dokumen	Trw 4 Rp 6.952.800 =	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	Trw 1 = 0 Dokumen	Trw 1 Rp - =	Kasubbag Umum & Perencanaan
				Trw 2 = 1 Dokumen	Trw 2 Rp 3.438.600 =	
				Trw 3 = 1 Dokumen	Trw 3 Rp 3.438.600 =	
				Trw 4 = 1 Dokumen	Trw 4 Rp 4.138.600 =	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan	Trw 1 = 0 Orang	Trw 1 Rp - =	Kasubbag Umum & Perencanaan
				Trw 2 = 2 Orang	Trw 2 Rp 10.000.000 =	
				Trw 3 = 4 Orang	Trw 3 Rp 20.000.000 =	
				Trw 4 = 4 Orang	Trw 4 Rp 20.000.000 =	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Trw 1 = 1 Paket	Trw 1 Rp 1.544.000 =	Kasubbag Umum & Perencanaan
				Trw 2 = 1 Paket	Trw 2 Rp 1.544.000 =	
				Trw 3 = 2 Paket	Trw 3 Rp 2.678.000 =	
				Trw 4 = 2 Paket	Trw 4 Rp 2.678.000 =	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Trw 1 = 1 Paket	Trw 1 Rp 3.292.000 =	Kasubbag Umum & Perencanaan
				Trw 2 = 1 Paket	Trw 2 Rp 7.780.000 =	
				Trw 3 = 1 Paket	Trw 3 Rp 11.268.000 =	
				Trw 4 = 1 Paket	Trw 4 Rp 16.510.000 =	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Trw 1 = 5 Dokumen	Trw 1 Rp 1.440.000 =	Kasubbag Umum & Perencanaan
				Trw 2 = 5 Dokumen	Trw 2 Rp 2.880.000 =	
				Trw 3 = 5 Dokumen	Trw 3 Rp 4.320.000 =	
				Trw 4 = 5 Dokumen	Trw 4 Rp 5.760.000 =	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Trw 1 = 3 Laporan	Trw 1 Rp 1.639.000 =	Kasubbag Umum & Perencanaan	
			Trw 2 = 6 Laporan	Trw 2 Rp 3.472.000 =		
			Trw 3 = 9 Laporan	Trw 3 Rp 5.260.000 =		
			Trw 4 = 12 Laporan	Trw 4 Rp 5.500.000 =		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Trw 1 = 3 Laporan	Trw 1 Rp 8.575.000 =	Kasubbag Umum & Perencanaan	
			Trw 2 = 6 Laporan	Trw 2 Rp 36.854.000 =		
			Trw 3 = 9 Laporan	Trw 3 Rp 56.892.200 =		
			Trw 4 = 12 Laporan	Trw 4 Rp 67.987.200 =		

			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Perlatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Trw 1 = 8 Unit Trw 2 = 8 Unit Trw 3 = 8 Unit Trw 4 = 8 Unit	Trw 1 Rp 20.800.000 Trw 2 Rp 20.800.000 Trw 3 Rp 20.800.000 Trw 4 Rp 20.800.000	Kasubbag Umum & Perencanaan							
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Trw 1 = 3 Laporan Trw 2 = 6 Laporan Trw 3 = 9 Laporan Trw 4 = 12 Laporan	Trw 1 Rp 1.085.000 Trw 2 Rp 1.085.000 Trw 3 Rp 1.725.000 Trw 4 Rp 1.725.000	Kasubbag Umum & Perencanaan							
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Trw 1 = 3 Laporan Trw 2 = 6 Laporan Trw 3 = 9 Laporan Trw 4 = 12 Laporan	Trw 1 Rp 6.060.000 Trw 2 Rp 11.790.000 Trw 3 Rp 17.774.800 Trw 4 Rp 22.559.800	Kasubbag Umum & Perencanaan							
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terselenggaranya Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Trw 1 = 3 Laporan Trw 2 = 6 Laporan Trw 3 = 9 Laporan Trw 4 = 12 Laporan	Trw 1 Rp 24.431.000 Trw 2 Rp 43.246.000 Trw 3 Rp 71.511.500 Trw 4 Rp 92.427.500	Kasubbag Umum & Perencanaan								
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Operasional atau Lapangan	Tersedianya kendaraan bermotor yang terawat dan terpelihara	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Trw 1 = 3 Unit Trw 2 = 6 Unit Trw 3 = 9 Unit Trw 4 = 11 Unit	Trw 1 Rp 24.637.500 Trw 2 Rp 34.025.000 Trw 3 Rp 44.662.500 Trw 4 Rp 54.300.000	Kasubbag Umum & Perencanaan				
							Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin yang terawat dan terpeliharaan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Trw 1 = 3 Unit Trw 2 = 6 Unit Trw 3 = 9 Unit Trw 4 = 11 Unit	Trw 1 Rp 2.230.000 Trw 2 Rp 5.070.000 Trw 3 Rp 7.910.000 Trw 4 Rp 7.910.000	Kasubbag Umum & Perencanaan				
						Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Tersedianya Bangunan yang terawat dan terpelihara	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Trw 1 = 0 Unit Trw 2 = 1 Unit Trw 3 = 1 Unit Trw 4 = 1 Unit	Trw 1 Rp - Trw 2 Rp 9.450.000 Trw 3 Rp 9.450.000 Trw 4 Rp 9.450.000	Kasubbag Umum & Perencanaan		
			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik							Tersedianya Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik	Trw 1 = 300 Pelaku Usaha Trw 2 = 800 Pelaku Usaha Trw 3 = 1200 Pelaku Usaha Trw 4 = 1500 Pelaku Usaha	Trw 1 Rp 47.249.000 Trw 2 Rp 130.663.000 Trw 3 Rp 149.907.000 Trw 4 Rp 167.088.000	Analisis Kebijakan Ahli Muda
						Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Terlaksananya usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah kegiatan usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko lintas daerah kabupaten/kota bagi kegiatan usaha dari	Trw 1 = 5 Kegiatan Usaha Trw 2 = 10 Kegiatan Usaha Trw 3 = 20 Kegiatan Usaha Trw 4 = 30 Kegiatan Usaha	Trw 1 Rp 5.374.000 Trw 2 Rp 14.741.000 Trw 3 Rp 25.200.000 Trw 4 Rp 33.585.000	Analisis Kebijakan Ahli Muda					
									Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Tersedianya Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang memperoleh layanan konsultasi perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara			Trw 1 = 50 Orang Trw 2 = 80 Orang Trw 3 = 110 Orang Trw 4 = 150 Orang	Trw 1 Rp 6.063.000 Trw 2 Rp 10.723.500 Trw 3 Rp 16.257.000 Trw 4 Rp 20.000.000	Analisis Kebijakan Ahli Muda

2	Meningkatnya Jumlah Investasi di Lampung Barat	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah Kab/Kota	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Trw 1 = 0 Dokumen	Trw 1 = Rp 410.000	Asesor Manajemen Mutu Industri Ahli Muda
							Trw 2 = 1 Dokumen	Trw 2 = Rp 283.135.000	
							Trw 3 = 1 Dokumen	Trw 3 = Rp 350.000.000	
							Trw 4 = 1 Dokumen	Trw 4 = Rp 350.000.000	
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	Terlaksananya Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku usaha yang mengikuti bimbingan teknis /sosialisasi implementasi perizinan berusaha berbasis resiko dan dan pengawasan perizinan berbasis	Trw 1 = 0 Pelaku Usaha	Trw 1 = Rp 8.100.000	Asesor Manajemen Mutu Industri Ahli Muda
							Trw 2 = 86 Pelaku Usaha	Trw 2 = Rp 150.157.000	
							Trw 3 = 172 Pelaku Usaha	Trw 3 = Rp 276.212.500	
							Trw 4 = 172 Pelaku Usaha	Trw 4 = Rp 300.000.000	
				Pengawasan Penanaman Modal	Terlaksananya Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang telah dianalisa dan diverifikasi data profil dan informasi kegiatan usaha dari pelaku dilakukan evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan	Trw 1 = 3 Kegiatan Usaha	Trw 1 = Rp 6.055.000	Asesor Manajemen Mutu Industri Ahli Muda
							Trw 2 = 6 Kegiatan Usaha	Trw 2 = Rp 53.640.000	
							Trw 3 = 9 Kegiatan Usaha	Trw 3 = Rp 79.084.000	
							Trw 4 = 11 Kegiatan Usaha	Trw 4 = Rp 115.178.000	
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah kabupaten/kota	Pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan nonperizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Tersedianya Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Trw 1 = 0 Dokumen	Trw 1 = Rp 11.475.000	Asesor Manajemen Mutu Industri Ahli Muda		
					Trw 2 = 0 Dokumen	Trw 2 = Rp 17.947.500			
					Trw 3 = 0 Dokumen	Trw 3 = Rp 24.920.000			
					Trw 4 = 1 Dokumen	Trw 4 = Rp 34.000.000			

Liwa, 08 Januari 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU (KATI PINTU)



Drs. DAMAN NASIR, M.P
NIP.19680701 198901 1 002

**PENYELENGGARAAN PROMOSI PENANAMAN MODAL
YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**



PELAKSANAAN PERESMIAN MAL PELAYANAN PUBLIK (MPP)



SOFT LAUNCHING MAL PELAYANAN PUBLIK (MPP)

